



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Ardiani Ika Sulistyawati¹⁾, Nugrah Septiyani Purwanti²⁾

^{1,2)} Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

e-mail: ardiani@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2018 secara parsial dan simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 22 Kabupaten / Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Data yang telah terkumpul dianalisis terlebih dahulu dengan menguji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

Abstract

This study aims to analyze the influence of the variable Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds and Employee Expenditures on Capital Expenditures in Regency / City Governments in East Nusa Tenggara Province in 2015-2018 partially and simultaneously. The population in this study was the District / City Government in the Province of East Nusa Tenggara with 22 Regencies / Cities. This study uses secondary data in the form of Realization Report of the East Nusa Tenggara Provincial Government Budget. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression with t test, F test and the coefficient of determination. The data that has been collected is analyzed first by testing the classical assumptions before testing the hypothesis.

The results of the research partially indicate that the variable Local Revenue and Special Allocation Funds have a significant effect on Capital Expenditures while the variable General Allocation Funds, Profit Sharing Funds and Employee Spending have no significant effect on Capital Expenditures. The results of the study simultaneously showed that the variables of Original Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds and Employee Expenditures affected Capital Expenditures.

Keywords: Regional Original Revenue, Balance Funds, Employee Expenditures and Capital Expenditures.



1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kebebasan dan kewenangan secara luas untuk menggunakan dan mengelola berbagai sumber daya dan potensi daerah yang dimilikinya sesuai kebutuhan dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilihat dari sisi keuangan negara telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal, desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Artinya dengan adanya desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengoptimalan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini berupa anggaran belanja modal (Sartika, *et al*, 2017).

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang menjalankan otonomi daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kabupaten dan 1 Kota dengan luas wilayah daratan Nusa Tenggara Timur adalah seluas 47.931,54 km² dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.200 km²). Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki batas-batas: Utara-Laut Flores, Selatan-Samudera Hindia, Timur-Negara Timor Leste, Barat-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Nusa Tenggara Timur berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores (Badan Pusat Statistik, 2019).

Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur demi mendorong kemajuan ekonomi, salah satunya dengan melakukan pembangunan dan perbaikan

berbagai sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk membiayai pembangunan tersebut maka diperlukan anggaran belanja modal yang besar, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat mengalokasikan anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan kebutuhan dalam membangun sarana dan prasarana infrastruktur.

Namun kenyataannya Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengalokasikan pendapatan daerah cenderung menggunakan untuk keperluan belanja rutin yang kurang produktif dan mengakibatkan minimnya anggaran belanja yang lain terutama anggaran belanja modal yang dapat digunakan untuk membiayai hal-hal produktif. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2018, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dalam hal ini lebih didominasi oleh belanja pegawai daripada belanja modal.

Dalam kurun waktu empat tahun yaitu dari tahun 2015-2018 rata-rata besarnya presentase belanja pegawai sebesar 41% dari total belanja. Sedangkan rata-rata presentase belanja modal sebesar 21% dari total belanja. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa hampir 50% atau setengah dari total belanja digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintah daerah. Masalah mengenai jumlah dan formasi PNS merupakan pemicu membengkaknya belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah, meskipun jumlah dan formasi ideal bagi setiap kantor pemerintahan telah ditentukan melalui peraturan, namun kondisi riilnya masih jauh dari kondisi ideal (Jiwatami 2013 dalam Prastiwi, *et al* 2016). Presentase belanja modal yang hanya 21% dari total belanja masih tergolong kecil. Hal ini masih jauh dari yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat dimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemerintah Pusat terus menghimbau Pemerintah Daerah agar persentase belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen bahkan naik setiap tahunnya sebesar 1 persen. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi, Pemerintah Daerah seharusnya mengubah komposisi belanja daerahnya karena akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif daripada belanja modal (Sartika, *et al* 2017).

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga tercapai kemajuan ekonomi bagi masyarakat. Alokasi belanja modal di Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung menurun setiap tahun, padahal masih banyak sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi di Nusa Tenggara Timur tergolong belum memadai. Masih banyak terdapat infrastruktur terutama jalan-jalan yang rusak dan berlubang serta akses yang masih sulit di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2018”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

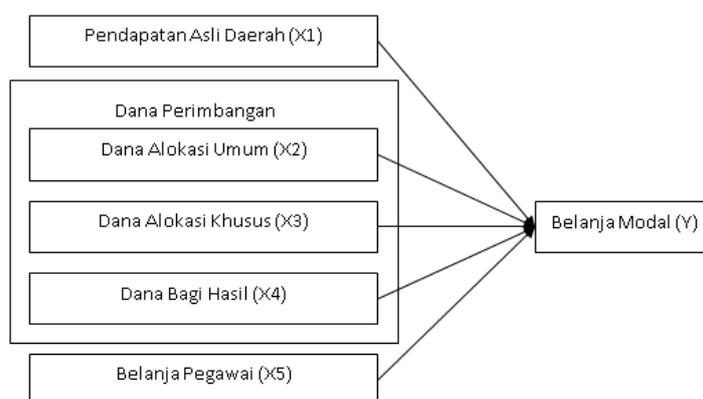
Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aktiva tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aktiva tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aktiva tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (PMK Nomor 102/PMK.02/2018). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 55 Tahun 2005).

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 55 Tahun 2005).

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik

kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah (PMK Nomor 102/PMK.02/2018). Berdasarkan hubungan diantara variabel tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004. Dalam menentukan belanja modal, pemerintah daerah mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima. Jika ingin menerima pendapatan asli daerah yang besar maka pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal dalam jumlah besar. Bila infrastruktur baik dan memadai, banyak investor akan berinvestasi sehingga pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, alokasi belanja modal juga akan semakin besar. Andriani & Yuliana (2016) dan Vanesha, *et al* (2019) menyimpulkan, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, tetapi menurut Abid, *et al* (2018), pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hipotesis 1: *Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal*

2) Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan dana alokasi umum minimal sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dana alokasi umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya (Adyatma dan Oktaviani, 2015). Dana alokasi umum berfungsi sebagai *equalization grant* yang menetralkan ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah (Walidi 2009 dalam Abid, *et al* 2018). Artinya jika dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah kecil maka dana alokasi umum yang diterima besar dan begitu pula sebaliknya. Dengan adanya dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah besar maka alokasi untuk belanja modal di daerah juga akan semakin besar dan begitu pula sebaliknya. Menurut Sartika, *et al* (2017) menunjukkan bahwa dana alokasi umum secara empiris berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin besar dana alokasi umum yang diperoleh daerah akan semakin besar pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja modal. Sedangkan menurut penelitian Abid, *et al* (2018) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya bahwa jika pemerintah daerah mendapatkan dana alokasi umum yang besar maka akan cenderung memiliki belanja modal yang besar.

Hipotesis 2: *Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal*

3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004). Jika suatu daerah memiliki kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional maka jumlah DAK suatu daerah yang dialokasikan pemerintah pusat menjadi besar dan akan mempengaruhi jumlah alokasi belanja modal daerah tersebut menjadi besar. Penelitian

Vanesha, *et al* (2019) dan Abid, *et al* (2018) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan Prastiwi, *et al* (2016) menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hipotesis 3: Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal

4) Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang menjadi salah satu faktor pendukung dari Belanja Modal. Adanya Dana Bagi Hasil ini biaya pembangunan di daerah dapat bertambah. Dana bagi hasil digunakan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Jika dana bagi hasil yang pemerintah pusat alokasikan kepada pemerintah daerah besar maka akan meningkatkan alokasi belanja modal dan begitu pula sebaliknya. Penelitian Andriani dan Yuliana (2016) dan Sartika, *et al* (2017) menyatakan, dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Tetapi Prastiwi, *et al* (2016) menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hipotesis 4: Dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal

5) Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal

Belanja pegawai adalah merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah (PMK Nomor 102//PMK.02/2018). Belanja pegawai merupakan

belanja yang mengambil porsi dan presentase yang paling tinggi diantara belanja lainnya. Dengan demikian semakin tinggi belanja pegawai yang dilakukan pemerintah daerah maka semakin rendah alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penganggaran biaya yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Kesenjangan dalam penganggaran belanja tentunya berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan, dimana idealnya belanja modal seharusnya lebih besar dari belanja pegawai karena belanja modal secara langsung digunakan untuk kepentingan publik. Penelitian Prastiwi, et al (2016) menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Hipotesis 5: Belanja pegawai berpengaruh terhadap belanja modal

3. METODE PENELITIAN

Objek dan populasi dalam penelitian ini adalah 22 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2018. Data ini diperoleh melalui *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu <https://ntt.bps.go.id>. Teknik sampling yang digunakan *full sampling* yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Sebelumnya akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi setelah itu melakukan pengujian hipotesis dengan melakukan uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_1 X_1 + \beta_1 X_1 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja modal

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Variabel pendapatan asli daerah

X_2 = Variabel dana alokasi umum

X_3 = Variabel dana alokasi khusus

X_4 = Variabel dana bagi hasil

X_5 = Variabel belanja pegawai

e = Variabel pengganggu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Statistik Deskriptif

Table 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	88	16.75	19.25	17.8664	.52294
DAU	88	19.57	20.44	20.0503	.21791
DAK	88	17.90	19.52	18.7746	.43482
DBH	88	15.43	20.59	16.7171	1.26692
BP	88	18.88	20.32	19.7149	.34691
BM	88	18.36	19.83	19.0773	.27387
Valid N (listwise)	88				

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil analisis variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan hasil tabel diatas, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan rata-rata sebesar 17,8664 dengan standar deviasi 0,5294. Nilai minimum sebesar 16,75 atau sama dengan Rp. 18.824.383.000 yang terdapat pada Kabupaten Malaka tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 19,25 atau sama dengan Rp. 229.137.473.000 yang terdapat pada Kota Kupang tahun 2017.
2. Berdasarkan hasil tabel diatas, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan rata-rata sebesar 20,0503 dengan standar deviasi 0,21791. Nilai minimum sebesar 19,57 atau sama dengan Rp. 316.115.258.000 yang terdapat pada Kabupaten Sumba Tengah tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 20,44 atau sama dengan Rp. 754.511.787.000 yang terdapat pada Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2016.
3. Berdasarkan hasil tabel diatas, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan rata-rata sebesar 18,7746 dengan standar deviasi sebesar 0,43482. Nilai minimum sebesar 17,90 atau sama dengan Rp. 59.290.200.000 yang terdapat pada Kota Kupang

tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 19,52 atau sama dengan Rp. 301.043.603.000 yang terdapat pada Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018.

4. Berdasarkan hasil tabel diatas, variabel Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan rata-rata sebesar 16,7171 dengan standar deviasi sebesar 1,26692. Nilai minimum sebesar 15,43 atau sama dengan Rp. 5.012.582.000 yang terdapat pada Kabupaten Sikka tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 20,59 atau sama dengan Rp. 875.755.403.000 yang terdapat pada Kabupaten Ende tahun 2016.
5. Berdasarkan hasil tabel diatas, variabel Belanja Pegawai (BP) menunjukkan rata-rata sebesar 19,7149 dengan standar deviasi sebesar 0,34691. Nilai minimum sebesar 18,88 atau sama dengan Rp. 158.791646.000 yang terdapat pada Kabupaten Sumba Tengah tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 20,32 atau sama dengan Rp. 670.669.636.000 yang terdapat pada Kota Kupang tahun 2016.
6. Berdasarkan hasil tabel diatas, variabel Belanja Modal (BM) menunjukkan rata-rata sebesar 19,0773 dengan standar deviasi sebesar 0,27387. Nilai minimum sebesar 18,36 atau sama dengan Rp. 94.261.785.000 yang terdapat pada Kabupaten Sabu Raijua tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 19,83 atau sama dengan Rp. 409.656.706.000 yang terdapat pada Kabupaten Kupang tahun 2017.

2) Hasil Uji Normalitas

Table 2
Hasil Uji Normalitas-Uji Kormogolov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.20044594
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.077
	Positive	.055
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal.

3) Hasil Uji Multikolonieritas

Table 3
 Hasil Uji Multikolonieritas
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.793	2.548		4.236	.000		
PAD	.195	.062	.371	3.124	.002	.462	2.163
DAU	.258	.271	.205	.952	.344	.140	7.123
DAK	.289	.065	.458	4.421	.000	.608	1.644
DBH	-.009	.018	-.043	-.513	.609	.929	1.077
BP	-.285	.164	-.362	-1.740	.086	.151	6.606

a. Dependent Variable: BM

Hasil pengujian dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa pada variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,462 dan nilai VIF 2,163. Pada variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai *tolerance* 0,140 dan nilai VIF 7,123. Pada variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai *tolerance* 0,608 dan nilai VIF 1,644. Pada variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai *tolerance* 0,929 dan nilai VIF 1,077. Variabel Belanja Pegawai memiliki nilai *tolerance* 0,151 dan nilai VIF 6,606. Hasil tersebut menunjukkan kelima variabel bebas tersebut terhindar dari multikolonieritas karena memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10.

4) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Table 4
 Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.930	1.559		.597	.552
	PAD	.013	.038	.055	.343	.733
	DAU	.048	.166	.083	.288	.774
	DAK	-.046	.040	-.161	-1.156	.251
	DBH	-.009	.011	-.093	-.825	.412
	BP	-.048	.100	-.133	-.477	.634

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari kelima variabel tersebut berada diatas 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

5) Hasil Uji Autokorelasi

Table 5
 Hasil Uji Autokorelasi-Run Test
 Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.02772
Cases < Test Value	44
Cases >= Test Value	44
Total Cases	88
Number of Runs	37
Z	-1.715
Asymp. Sig. (2-tailed)	.086

a. Median

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,086 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

6) Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6
 Analisis Regresi Linier Berganda
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.793	2.548		4.236	.000
	PAD	.195	.062	.371	3.124	.002
	DAU	.258	.271	.205	.952	.344
	DAK	.289	.065	.458	4.421	.000
	DBH	-.009	.018	-.043	-.513	.609
	BP	-.285	.164	-.362	-1.740	.086

a. Dependent Variable: BM

Berdasarkan Tabel 6 maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$BM = 10,793 + 0,195PAD + 0,258DAU + 0,289DAK - 0,009DBH - 0,285BP$$

7) Hasil Pengujian Hipotesis

- Berdasarkan tabel di atas variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai t hitung sebesar 3,124 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 sehingga **H1 diterima**.
- Berdasarkan tabel di atas variabel Dana alokasi Umum mempunyai nilai t hitung sebesar 0,952 dan nilai signifikansi sebesar 0,344 sehingga **H2 ditolak**.
- Berdasarkan tabel diatas variabel dana Alokasi Khusus mempunyai nilai t hitung sebesar 4,421 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga **H3 diterima**.
- Berdasarkan tabel di atas variabel Dana Bagi Hasil mempunyai nilai t hitung sebesar -0,513 dan nilai signifikansi sebesar 0,609 sehingga **H4 ditolak**.
- Berdasarkan tabel di atas variabel Belanja Pegawai mempunyai nilai t hitung sebesar -1,740 dan nilai signifikansi sebesar 0,086 sehingga **H5 ditolak**.

8) Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 7
 Hasil Uji F atau Uji Simultan
 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.030	5	.606	14.214	.000 ^b
	Residual	3.496	82	.043		
	Total	6.525	87			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), BP, DBH, DAK, PAD, DAU

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Dari hasil pengolahan data diperoleh F hitung sebesar 14,214 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ hal ini berarti bahwa model regresi tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal dinyatakan fit atau cocok. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

9) Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8
 Hasil Uji Koefisien determinasi
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.681 ^a	.464	.432	.20647	1.740

a. Predictors: (Constant), BP, DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,432 yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai mempunyai peranan sebesar 43,2%

dalam menjelaskan Belanja Modal sedangkan sisanya sebesar 56,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

10) Pembahasan

a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil statistik, hipotesis pertama atau H1 diterima yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Adanya pengaruh positif dan signifikan ini berarti bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah akan semakin tinggi pula pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Belanja Modal. Dalam menentukan belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempertimbangkan dengan pendapatan asli daerah yang diterima. Jika pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka alokasi Belanja Modal juga akan tinggi. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari potensi suatu daerah itu sendiri yaitu dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Untuk menggali berbagai potensi daerah tersebut agar Pendapatan Asli Daerah tinggi maka diperlukannya berbagai fasilitas pelayanan publik yang memadai misalnya, infrastruktur dan fasilitas lainnya. Maka dari itu untuk membangun berbagai fasilitas pelayanan publik diperlukan belanja modal yang tinggi. Jadi Pendapatan Asli Daerah yang meningkat akan bermanfaat dalam menyediakan berbagai fasilitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana dan prasarana terutama pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prastiwi, *et al* (2016), Andriani & Yuliana (2016) dan Vanesha, *et al* (2019) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Tetapi tidak sejalan dengan temuan Abid, *et al* (2018), Suryani dan Pariani (2018) dan Lestari, *et al* (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

b) Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji empiris, H2 ditolak yaitu Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi atau rendah Dana Alokasi Umum tidak akan mempengaruhi Belanja Modal. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang kegunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih banyak menggunakan Dana Alokasi Umum untuk membiayai belanja yang bersifat operasional lainnya dalam hal ini lebih banyak digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai. Penelitian ini mendukung riset Andriani & Yuliana (2016) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Tetapi tidak sejalan dengan Prastiwi, *et al* (2016), Sartika, *et al* (2017), Suryani dan Pariani (2018) dan Vanesha, *et al* (2019) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

c) Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis, H3 diterima yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Adanya pengaruh positif dan signifikan ini berarti bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus akan semakin tinggi pula pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai pembangunan nasional khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah. Dana Alokasi Khusus tersebut diprioritaskan pada investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik

dengan umur ekonomis yang panjang termasuk pengadaan sarana fisik penunjang yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian Dana Alokasi Khusus akan menambah asset pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Vanesha, *et al* (2019) dan Abid, *et al* (2018) bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Tetapi tidak sejalan dengan Prastiwi, *et al* (2016), Andriani & Yuliana (2016) dan Sartika, *et al* (2017) bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

d) Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa hipotesis keempat atau H4 ditolak yaitu Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan tingkat signifikansi $0,609 > 0,05$. Semakin tinggi atau rendah Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Belanja Modal. Dana bagi hasil yang diterima daerah tidak menjadi sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk belanja modal. Pengalokasian dana bagi hasil tidak digunakan untuk belanja modal namun lebih digunakan untuk membiayai belanja daerah yang lain yaitu lebih dialokasikan ke dalam belanja rutin, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan pos-pos belanja lainnya. Dana bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil didapat dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Presentase pembagiannya yaitu daerah penghasil mendapat bagian yang lebih besar dan daerah lain yang masih dalam satu provinsi mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan undang-undang. Dana bagi hasil digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah guna membangun dan mensejahterakan masyarakat dan daerahnya. Hasil ini mendukung temuan Prastiwi, *et al* (2016) bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun tidak

sejalan dengan kesimpulan Andriani & Yuliana (2016) dan Sartika, *et al* (2017) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.

e) Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H5 ditolak yaitu Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi atau rendahnya Belanja Pegawai tidak mempengaruhi Belanja Modal. Dalam penganggaran belanja pegawai pemerintah daerah mempertimbangkan banyaknya jumlah pegawai di pemerintahan tersebut. Semakin besar jumlah pegawai maka akan semakin besar anggaran belanja pegawai yang dikeluarkan dan begitu pula sebaliknya. Sumber utama untuk alokasi belanja pegawai adalah dana alokasi umum karena besar kecilnya dana alokasi umum suatu pemerintah daerah ditentukan oleh celah fiskal dan alokasi dasar dimana alokasi dasar tersebut dihitung dari jumlah banyaknya pegawai di pemerintah daerah. Sedangkan sumber utama pengalokasian belanja modal adalah dana alokasi khusus dimana dana alokasi khusus ini adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan wilayah kewenangan daerah akan tetapi sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana prasarana fisik untuk melakukan pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Belanja pegawai akan meningkat apabila jumlah pegawai negeri dalam suatu daerah bertambah dan akan berkurang jika jumlah pegawai negeri dalam suatu daerah berkurang. Dengan demikian belanja pegawai tidak mempengaruhi jumlah alokasi belanja modal. Menurut Jiwatami (2013) dalam Prastiwi, *et al* (2016) menyatakan, penganggaran biaya yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Kesenjangan dalam penganggaran belanja tentunya berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan, dimana idealnya belanja modal seharusnya lebih besar dari belanja pegawai karena belanja modal secara langsung digunakan untuk kepentingan publik. Penelitian ini tidak mendukung Prastiwi,

et al (2016) yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Jadi, semakin tinggi atau rendah besarnya Belanja Pegawai tidak akan mempengaruhi pengalokasian Belanja Modal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
2. Struktur dana perimbangan yang direpresentasikan oleh dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
3. Struktur dana perimbangan yang direpresentasikan oleh dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
4. Struktur dana perimbangan yang direpresentasikan oleh dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
5. Belanja Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

6. REFERENSI

- Abid, M., Rahayu, S., & Aminah, W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015) . *e-Proceeding of Management: Vol. 5 No.1* .
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol. 4 No. 2* .
- Andriani, N. L., & Yuliana, L. (2016). Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013. *Jurnal Ilmiah WIDYA Vol. 3 No. 3* .
- BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2018, Oktober 26). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017*. Retrieved November 10, 2019, from Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur: <https://ntt.bps.go.id/publication/2018/10/26/de5428985ffa6f7e643b7b6b/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-provinsi-nusa-tenggara-timur-2017.html>

- BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2019, Oktober 28). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018*. Retrieved November 10, 2019, from Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur: <https://ntt.bps.go.id/publication/2019/10/28/062aeb572f8b954bafbb1f94/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-provinsi-nusa-tenggara-timur-2018.html>
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Prastiwi, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja modal Pemerintah Kota Surakarta. *Seminar Nasional IENACO-2016*.
- Ramlan, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 5 No. 2*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. LN Nomor 126 Tahun 2004. TLN Nomor 4438.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. LN Nomor 130 Tahun 2009. TLN Nomor 5049.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. LN Nomor 244 Tahun 2014. TLN Nomor 5587.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*. LN Nomor 137 Tahun 2005. TLN Nomor 4575.
- Sarjono, H., & Juliana, W. (2013). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sartika, N., Kirmizi, & Indrawati, N. (2017). Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Sorot Volume 12 Nomor 2*.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol. 6 No. 1*.
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 14. No.1*. www.ntt.bps.go.id